

HISTORIOGRAFI ORDE BARU YANG HEGEMONIK DAN PEMBELAJARAN SEJARAH DI SEKOLAH (SMP, SMA)

IG. Krisnadi

Email: ignatius.krisnadi@gmail.com

Abstrak: Artikel ini bertujuan menjelaskan upaya pemerintah Orde Baru mengendalikan sejarah, sejarah kontroversial dan krisis pembelajaran sejarah, demokratisasi sejarah dan memformat ulang historiografi Orde Baru. Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Setiap permasalahan yang muncul di dalam penelitian ini didekati dengan ilmu politik, dan dianalisis menggunakan teori hegemoni dari Antonio Gramsci.

Kata kunci: Historiografi Orde Baru, sejarah kontroversial, krisis pembelajaran sejarah, demokratisasi sejarah, hegemoni.

1. Pendahuluan

Di kalangan sejarawan, gugatan terhadap gambaran masa lalu merupakan bagian dinamika ilmu sejarah. Gugatan sejarah dilakukan para politisi ketika melihat gambaran masa lalu yang ditampilkan dianggap merugikan kepentingan politiknya. Selain itu, gugatan sejarah datang dari masyarakat ketika melihat gambaran masa lalu yang ditampilkan, dianggap meniadakan atau memperkecil peran tokoh yang diidolakan di dalam perjuangan bangsa atau peran lain. Di kalangan sejarawan, gugatan sejarah dilancarkan ketika mengetahui terjadi manipulasi sejarah dari pihak penguasa untuk mengamankan statusquonya, sehingga kredibilitas gambaran masa lalu yang ditampilkan dianggap rusak, dan perlu diformat ulang. Namun sesungguhnya, gambaran masa lalu yang ditampilkan itu menjadi ajang pertarungan terus-menerus tiada berkesudahan (*conflict area*) bagi pihak manapun yang menginginkannya.

Sejarawan dianggap sebagai sekelompok orang yang dapat mempertemukan masa lalu dengan masa kini, dan “meramal” kemungkinan akan terjadi di masa mendatang, sehingga sejarawan menjadi “wilayah” perebutan hegemoni bagi pihak manapun yang memanfaatkannya. Perebutan hegemoni didasarkan atas diktum “siapa yang menguasai kekinian, akan menguasai masa lalu, dan siapa yang menguasai masa

lalu akan menguasai masa depan (Abdullah, 1999:2). Hal ini merangsang penguasa, para politisi atau bahkan masyarakat untuk memanfaatkan sejarawan guna menggapai kepentingannya. Maka tidak berlebihan jika Presiden Uni Sovyet, Khrushchev mengatakan, sejarawan adalah sekelompok orang “berbahaya,” karena dengan dokumen primer yang dimiliki, dapat mengungkap peristiwa sosial-politik terjadi di masa lalu yang kebenarannya tidak terbantahkan, sehingga dapat menjatuhkan rezim yang berkuasa. Oleh karena itu, sejarawan harus diawasi negara, dan sejarah menjadi urusan negara (Asvi, 1999:27).

Pada masa pergerakan nasional, Bung Karno memanfaatkan sejarah untuk menggelorakan semangat patriotisme dan nasionalisme guna mengusir penjajah (Soekarno, 1964), dan pada masa kemerdekaan, ia menginginkan narasi sejarah untuk membangun kesadaran nasional yang mengintegrasikan bangsa. Untuk merealisasi keinginannya, ia memerintahkan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (Kementerian PP&K) menyelenggarakan Seminar Sejarah Nasional I di UGM Jogjakarta pada 14-15 Desember 1957. Sartono Kartodirdjo di dalam Seminar tersebut memaparkan makalah perlunya menyusun periodisasi sejarah nasional berwawasan Indonesia sentris dari sudut pandang “orang dalam” dengan menonjolkan aktivitas bangsa Indonesia berkiprah di panggung sejarah nasional, sehingga terbangun kesadaran nasional yang dapat mengintegrasikan bangsa (Kementerian PPK, 1957:198-216). Namun keinginan menyusun narasi sejarah Indonesia sentris yang memantulkan kesadaran nasional dan mengintegrasikan bangsa seperti yang direkomendasikan panitia seminar tersebut belum terealisasi, terkait situasi poleksosbud-hankam tidak stabil. Bahkan situasi demikian, membawa kejatuhan Presiden Sukarno.

Kejatuhan Soekarno diikuti krisis ekonomi, digantikan rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto (1966-1998). Orde ini memerlukan percepatan perbaikan ekonomi diikuti tercipta stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu diperlukan pendekatan pembangunan otoriter-tersentralistik. Di era ini, Soeharto menginginkan penyusunan narasi sejarah Indonesia tersentralistik dan eskatologis melalui pemaparan sejarah didahului “cahaya” era keemasan pra-kolonial sebagai masa embrio identitas nasional, dilanjutkan era “kegelapan” kolonial sebagai masa penindasan kolonial, memunculkan perjuangan heroik melawan kekuasaan kolonial yang mencapai fase kebangkitan nasional (1908) dan mencapai titik kulminasi pada 17 Agustus 1945

dengan menghasilkan kemerdekaan RI. Dilanjutkan “bab penutup” zaman Orde Baru didahului sengketa “*nation*”, dan Soeharto tampil sebagai “Juru Selamat” bangsa. Ia menginginkan “tujuan akhir sejarah” bebas dari kejadian-kejadian yang mengganggu (Schulte Nordholt, dkk., 2008:11). Buku yang membawa amanat ini adalah Sejarah Nasional Indonesia 6 jilid (1975), dan beberapa edisi revisi.

Sartono Kartodirdjo mengundurkan diri sebagai editor buku tersebut (1984) karena keinginan menggunakan berbagai disiplin ilmu dan perpektif untuk menjelaskan proses integrasi budaya sebagai pembentuk “*nation*” yang jauh mendahului negara kolonial melalui interaksi antara sejarah lokal dan proses di tingkat nasional terganjal, pada hal itu persoalan sangat *urgent*. Hasrat ini tidak terakomodir dalam proyek sejarah nasional yang diambil-alih sejarawan militer Nugroho Notosusanto yang menghendaki peran militer sebagai agen pembentukan “*nation*” (Schulte Nordholt, dkk., 2008:13).

Historiografi Orde Baru yang hegemonik dalam hal ini penulisan sejarah Indonesia yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru melalui institusi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Negara RI maupun institusi militer. Misal buku berjudul *Sejarah Nasional Indonesia* (6 jilid) yang diterbitkan pada tahun 1970 maupun edisi revisi tahun 1984. Buku ini kemudian di *breakdown* menjadi buku paket dan sekaligus menjadi buku pegangan guru di dalam pembelajaran sejarah di sekolah. Misal buku *Sejarah Nasional Indonesia: Untuk SMP* (3 jilid) yang terbit tahun 1975 (Nugroho Notosusanto dkk., 1975), buku *Sejarah Nasional Indonesia: Untuk SMA* (3 jilid) yang terbit tahun 1977 (Nugroho Notosusanto dkk., 1975). Selain itu, buku sejarah resmi lainnya seperti buku *Gerakan 30 September; Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya* yang dikeluarkan oleh Sekretaris Negara RI (1994) maupun buku yang dikeluarkan Mabes ABRI berjudul *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia Jilid IV A, Pemberontakan G30S/PKI dan Penumpasannya* ditulis para sejarawan atas perintah Mabes ABRI yang diterbitkan tahun 1994 oleh Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI. Para sejarawan penulis buku tersebut dikontrol dan dikendalikan pemerintah Orde Baru. Buku-buku tersebut diajarkan maupun dibaca di lingkungan sekolah, prajurit, maupun masyarakat luas sebagai buku resmi sejarah yang memiliki kebenaran tunggal versi pemerintah Orde Baru. Kebenaran-kebenaran lain yang ditampilkan pihak manapun di luar buku sejarah resmi dianggap menyesatkan, dan dilarang beredar di masyarakat.

Titik lemah historiografi Orde Baru dibangun atas dasar dokumen-dokumen palsu, kesaksian-kesaksian palsu sengaja diciptakan sebagai propaganda militer untuk menghancurkan PKI. Hal ini menimbulkan dendam rakyat untuk melakukan pembunuhan massal dikoordinir negara terhadap ratusan ribu anggota/simpatisan atau yang distigma PKI. Namun episode pembunuhan massal sengaja disembunyikan atau tidak disajikan dalam buku tersebut (Roosa, 2008:3-15), sehingga historiografi Orde Baru memunculkan paradoks ironis dari sebuah “sejarah tanpa kekerasan” yang didominasi militer (Schulte Nordholt, dkk., 2008:14). Pada hal, menurut laporan akhir Pengadilan Rakyat Internasional (IPT '65), negara bukan sekedar melakukan pembunuhan massal terhadap ratusan ribu anggota/simpatisan atau yang distigma PKI, melainkan juga melakukan tindak kejahatan kemanusiaan seperti penyiksaan, pemenjaraan, pengasingan, kekerasan seksual, perbudakan yang semuanya dilakukan tanpa proses hukum atau para pelakunya bebas dari sanksi hukum (Klinken, 2017:58-75-270). Atas dasar hal tersebut, kredibilitas historiografi Orde Baru telah rusak, dan harus diformat ulang dengan menampilkan sisi-si lain yang sengaja dihilangkan rezim Orde Baru yang semestinya memiliki kebenaran sejarah secara faktual, dan diikuti upaya penyelesaian krisis pembelajaran sejarah di sekolah.

Penelitian tentang historiografi Orde Baru yang hegemonik dan pembelajaran sejarah di sekolah (SMP, SMA) mencakup pembahasan sebagai berikut: (1) Orde Baru mengendalikan sejarah; (2) sejarah kontroversial dan krisis pembelajaran sejarah; (3) demokratisasi sejarah; (4) memformat ulang historiografi Orde Baru. Metode digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode ini memberikan “rambu-rambu” penelitian sejarah ilmiah berupa tahap-tahap kegiatan penelitian: heuristik, kritik interpretasi, historiografi (Gottschalk, 1975:27-38,). Metode ini mampu memformat ulang historiografi Orde Baru secara kritis, sehingga menghasilkan format baru historiografi Orde Baru yang kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Setiap permasalahan muncul di dalam penelitian ini dicoba dipecahkan dengan menggunakan teori hegemoni dari Antonio Gramsci. Menurut Antonio Gramsci, hegemoni selalu dihubungkan dengan penyusunan kekuatan oleh “masyarakat politik (Negara) terhadap “masyarakat sipil” (rakyat) (Nezar, Andi, 2003:16, 34) yang dilakukan secara *coercion* maupun *non-coercion* (Mudji, 1992:98). Pemerolehan

hegemoni secara *coercion*, berhubungan dengan penyusunan kekuatan negara sebagai kelas diktator secara represif (intimidasi, tindak kekerasan) dengan menggunakan alat-alat kekuasaan seperti angkatan bersenjata, polisi, lembaga hukum (Roger, 2004:104). Pemerolehan hegemoni secara *non-coercion* terkait penyusunan kekuatan negara melalui penguasaan kesadaran kritis masyarakat yang dilakukan secara kultural (halus-membius), sehingga semuanya dapat dikontrol dalam pembiasaan penyeragaman basis-basis keyakinan dan persepsi yang sama mengenai kebenaran (kebenaran tunggal) ditentukan dari birokrat. Salah satu cara sosiologis untuk mengukur apakah sebuah hegemoni sedang berlangsung dengan memunculkan pertanyaan “*sedang tidurkah kesadaran kritis masyarakat oleh proses penyeragaman berpikir?*” Atau melalui pertanyaan “*adakah tempat untuk kritik terbuka?*” Kritik dijadikan sebagai tolok ukur untuk mengetahui berlangsung-tidaknya hegemoni, karena kritik berfungsi membedah penyalahgunaan kekuasaan. Jika kritik dibungkam dengan cara kasar atau secara manipulasi halus-membius yang mampu menidurkan daya pikir-kritis, berarti hegemoni sedang berlangsung (Mudji, 1992:98-99).

Jenderal Soeharto menghancurkan lawan-lawan politik baik secara fisik maupun mental (*coercion*) dengan melakukan penangkapan, penganiayaan, penahanan, intimidasi, penculikan, pembunuhan maupun pembuangan. Hal ini pernah dialami 9957 tahanan politik (tapol) Golongan B dari Jawa yang dibuang oleh rezim Orde Baru ke Kamp Konsentrasi Pulau Buru (IG. Krisnadi, 2001) dan 64 tapol wanita dari berbagai organisasi massa PKI yang dimasukkan ke Kamp Plantungan (Amurwani, 2011:285-290). Selain itu, hegemoni diperoleh secara *non-coercion* seperti melalui penyelenggaraan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Masyarakat) ke berbagai instansi pemerintah, upaya de-Soekarnoisasi, upaya mengangkat citra sejarah militer melalui PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa), penulisan Sejarah Nasional Indonesia (6 jilid), pembangunan museum dan monumen bersejarah beserta diorama, dan penayangan film propaganda karya Arifin C. Nur berjudul Pengkhianatan G.30.S PKI (1984).

2. Orde Baru Mengendalikan Sejarah

Hasil pengendalian sejarah tergantung di mana “dapur” sejarah diolah?, siapa sejarawan yang mengolah?, dan di lembaga mana sejarawan bekerja? Dalam hal ini berlaku prinsip semakin independen sejarawan bekerja di suatu lembaga, semakin otonom hasil

karyanya, dan semakin tidak independen sejarawan bekerja di suatu lembaga, semakin tidak otonom hasil karyanya (Asvi, 1999:56). Jika “dapur” mengolah sejarah dari institusi militer, penulisan sejarah ditekankan stabilitas dan keamanan negara. Dalam hal ini, sejarawan mendapat pengawasan ketat dari militer, sehingga posisi sejarawan tidak independen dalam bekerja, maka produk sejarah yang dihasilkan tidak otonom, karena menyajikan kebenaran tunggal menurut versi pemerintah. Namun jika “dapur” pengolah sejarah dari lembaga perguruan tinggi atau lembaga penelitian, sejarawan bekerja independen dan profesional, produk sejarah yang dihasilkan otonom, profesional, ilmiah. Di era Orde Baru (1966-1998), sejarah dikendalikan militer sebagai “dapur” pengolah sejarah. Orang dipercaya untuk pekerjaan ini, Nugroho Notosusanto. Ia memegang peran kunci dalam menyusun historiografi Orde Baru.

Upaya Orde Baru mengontrol sejarah, tampak kasus Tragedi Gerakan 30 September 1965. Melalui buku *Sejarah Nasional Indonesia* Jilid 6 (1984), buku *Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya* (Sekneg . RI 1994), atau buku terbitan militer, seperti *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia: Pemberontakan G30S/PKI dan Penumpasannya*, Jilid IV A (Mabes ABRI,1994), atau buku *Mengapa G30S/PKI Gagal: Suatu Analisis* ditulis Mayjen (Purn.) Samsudin (2005). Buku-buku itu menyajikan keberhasilan militer menyelamatkan bangsa dari pemberontakan G30S yang didalangi PKI . Menurut ketiga buku tersebut, dalang G30S adalah PKI dengan memeralat ABRI. Untuk meyakinkan masyarakat bahwa yang bertanggungjawab atas Tragedi G30S 1965 adalah PKI, dibuat akronim G.30.S/PKI atau Gestapu-PKI. Ketiga buku tersebut cacat secara metodologis, karena dibangun atas dasar dokumen palsu, kisah cerita palsu, kesaksian palsu sebagai bagian propagandis kebencian terhadap PKI. Hal ini berimplikasi timbulnya balas dendam rakyat dengan melakukan pembunuhan massal terhadap anggota/simpatisan atau yang distigma PKI atas arahan negara (Klinken, ed.2016, Luhulima, 2007, Aboeprijadi, dkk.ed., 2017).

Pihak Angkatan Darat bersusah payah menyusun mozaik fiksi, namun berhasil. Sebelum mozaik fiksi dibangun, Senin 4 Oktober 1965, setelah ke-enam jenderal dan seorang perwira pertama diangkat dari sumur tua Lubang Buaya, Pangkostrad Soeharto mengeluarkan pernyataan disiarkan langsung RRI dan TVRI pukul 15.00 sebagai berikut: “*Jelas betapa kejam dan biadabnya aniaya yang dilakukan petualang-*

petualang G30S. Ketujuh jenazah Pahlawan Revolusi, 6 jenderal dan seorang perwira pertama, ditemukan dalam keadaan tubuh yang jelas penuh luka karena siksaan. Bekas luka di sekujur tubuh pahlawan kita” (Eros,2006:16). Untuk menguatkan pernyataan itu, segera dibuatkan data (fiktif) dengan cara para “saksi” dikutip, foto-foto dicetak di surat-surat kabar, disusun kisah fiktif kebiadaban Gestapu-PKI (G30S/PKI) ditunjukkan melalui para anggota Gerwani maupun Pemuda Rakyat melakukan “penyiksaan” terhadap para jenderal sebelum dimasukkan ke sumur tua Lubang Buaya.

Surat kabar harian *Angkatan Bersendjata* (5 Oktober 1965) menampilkan beberapa foto kabur dari mayat-mayat mulai membusuk digambarkan kematian mereka sebagai perbuatan bar-bar dalam bentuk penyiksaan di luar batas kemanusiaan. Sementara itu, surat kabar harian *Berita Yudha* (5 Oktober 1965) menyebutkan mayat-mayat korban tertutup, terdapat tanda-tanda mengindikasikan luka-luka penyiksaan. Jumat 9 Oktober 1965, *Berita Yudha* memberitakan jasad Lettu Pierre Tendean terdapat luka sayatan pisau di dada sebelah kiri dan perut, leher dipenggal dan kedua mata dicungkil keluar. Minggu 11 Oktober 1965, surat kabar harian *Angkatan Bersendjata* menulis Pierre Tendean (tawanan) diperlakukan sebagai “barang mainan” Gerwani (Eros, 2006:17). Untuk membenarkan berita itu, seorang perempuan “anggota” Gerwani, Djamilah (15 tahun) memberi kesaksian “jujur” dimuat di surat kabar *Angkatan Bersendjata* (5-11-1965), *Duta Masyarakat* (6-11-1965), *Sinar Harapan* (6-11-1965), *Berita Yudha* (7-11-1965) sebagai berikut:

“Hari itu dan hari berikutnya kami latihan... dan kira-kira djam tiga malam kami dibangunkan... diperintahkan untuk mengganjang kabir dan Nekolim. Ada sekitar 500 orang berkumpul di sana, 100 orang diantaranya wanita. Kepada anggota-anggota Gerwani, termasuk Djamilah, dibagikan pisau-pisau lipat dan silet.... Dari djauh kami melihat seseorang gemuk pendek datang; ia memakai piama berpotongan Ganefo. Kedua tangannya diikat dengan kain merah. Juga matanya ditutup dengan kain merah. Dan Ton pimpinan kami memberi perintah supaya kami memukul orang itu, lalu mulailah dengan pisau lipat itu mereka menikam kemaluannya. Jang pertama kali, menurut penglihatan kami, memukul dan menikam kemaluan orang itu Ketua Gerwani Tanjung Priok jang bernama “S”., dan Nj. “Sas”. Lalu teman-temannya mengikuti... kemudian kami juga ikut menjiksa orang itu. Kami semuanya 100 orang jang

melakukan perbuatan itu... Lalu orang itu diseret ke sebuah sumur oleh seorang laki-laki berseragam... tapi ia masih belum mati. Lalu seorang berseragam memerintahkan Gerwani supaya meneruskan. Dan orang-orang Gerwani meneruskan seperti yang sudah, menikam dan memicis kemaluannya dan seluruh tubuhnya sampai ia mati. (Saskia,1999:522).

Menurut Saskia, (1999:522), ke empat surat kabar itu menyiarkan kesaksian Djamilah dengan kata maupun kalimat sama. Dua surat kabar memuat potret sama (Djamilah). Ini memberi kesan kuat, bahwa pers dibagikan teks dan potret yang sudah disiapkan. Kesan berikut, pihak propagandis kebencian PKI tidak mempercayai “pengakuan jujur” Djamilah untuk berbicara sendiri kepada pers. Berita ini sangat bernada menghasut, dan tersebar luas di kalangan masyarakat.

Kisah cerita keganasan Gestapu-PKI lainnya terdapat dalam kesaksian salah seorang “anggota” Gerwani, Saina kepada tim pemeriksa yang dimuat dalam surat kabar *Sinar Harapan* (13 Desember 1965). Di depan tim pemeriksa, Saina mengaku beberapa kali disuntik selama latihan enam setengah bulan di Lubang Buaya, sesudah diinjeksi ia merasa napsu syahwatnya menjadi liar. Menurut Kepala Tim Interogasi Peperlada Jawa Barat, Mayor A. Danamihardjo SH, selama enam setengah bulan latihan, Saina harus bersaing dengan 199 anggota Gerwani dalam melayani birahi 400 orang laki-laki yang juga dilatih di sana. Suntikan itu mendorong melakukan perbuatan cabul. Ia juga mengatakan kepada tim interogasi, Aidit (Ketua CC-PKI) pernah berpidato di barak latihan, bahwa sukarelawan PKI tidak perlu merasa terkekang oleh aturan-aturan agama, sebaiknya mereka melakukan hubungan seks satu sama lain secara bebas. Ia melakukan perbuatan semacam itu sesudah mendengarkan pidato Aidit (Stanley, 1999:21-22). Sementara itu surat kabar *Angkatan Bersenjata* (3 Nopember 1965) memuat potret dua gadis remaja tampak ketakutan dengan pernyataan seorang laki-laki anggota Pemuda Rakyat yang menyebut bahwa ia melihat “tiga puluh orang Gerwani berteriak-teriak menyiksa dan bermain-main dengan Jenderal Yani yang sudah dalam keadaan pingsan (Stanley, 1999:16).

Kisah cerita keganasan Gestapu-PKI jika dibaca, membuat perut terasa mual, marah dan bergidik. Mereka membayangkan para perempuan pelaku kekejaman itu bukan manusia, melainkan setan perempuan jahat, kuntilanak (Saskia, 1998:31). Cerita ini disiarkan melalui radio , televisi berulang-ulang, bahkan dibuatkan film, dan anak-

anak sekolah wajib menonton, serta diabadikan dalam monumen atau nama-nama jalan. Bahkan cerita fiktif ini oleh para ilmuwan (sejarawan) atau wartawan, mahasiswa dikutip berulang kali untuk keperluan menulis buku, artikel, makalah, skripsi, tesis, disertasi, sehingga kisah fiktif pun hingga kini berubah menjadi “fakta” di kalangan masyarakat luas. Melalui cara demikian, Orde Baru lahir setelah berhasil membunuh “setan jahat” bernama PKI (Wood, 2013:230-233).

Saskia (1999), Klinken (2017), Stanley (1999), Hikmah (2007), Ita (2009), Anna (2015), menganggap kisah cerita tersebut fiktif, dan sengaja dibuat pihak propagandis untuk mencelakakan PKI. Menurut Saskia, keberadaan sejumlah anggota Gerwani di Lubang Buaya (Kompleks Halim) saat itu karena ikut latihan bersama sukarelawan lain berasal dari para istri prajurit dari Divisi Cakrabirawa, Pemuda Rakyat, SOBSI, BTI. dalam rangka Dwikora (1999:501). Menurut seorang anggota Gerwani, Sulami, pada 30 September 1965, Wakil Ketua DPP Gerwani, Suharti Suwanto (anggota CC-PKI) datang ke kantor DPP Gerwani meminta tenaga beberapa orang untuk latihan Dwikora di Lubang Buaya. Ini tidak terbiasa bagi Gerwani, karena Gerwani mempunyai tempat latihan di Cipete, Jakarta Selatan. Di tempat ini 50 anggota Gerwani dilatih dalam rangka pendidikan kader revolusi (Pekarev). Namun Gerwani memenuhi tugas tersebut, dan mereka sesampai di lokasi, ternyata hanya ditugaskan menyiapkan konsumsi dan menyiapkan dapur umum. Di Lubang Buaya, Mayor Udara Suyono memberikan latihan kepada para sukwan-sukwati dari Pemuda Rakyat, Gerwani, SOBSI, BTI mulai Juli 1965, dan latihan dilakukan secara bergelombang. Tempat latihan tidak hanya digunakan para ormas PKI, tetapi juga para perempuan atau pemuda dari organisasi lain tergabung dalam anggota Front Nasional seperti Perwari, Wanita Marhaen, Wanita Islam, Aisyah, istri-istri prajurit dari Divisi Cakrabirawa (Hikmah, 2007:177-178), dan pada 1 Oktober 1965 para pemuda NU diharapkan akan datang untuk menjadi sukwan-sukwati atas panggilan Dwikora (Saskia, 1999:500). Menurut Sulami, selama bulan September 1965, DPP Gerwani bersidang tiga kali untuk mempersiapkan kongres Gerwani pada 1 Oktober 1965. Sama sekali tidak pernah membicarakan akan terjadi G30S, dan juga tidak ada surat instruksi apapun ke daerah. Misal instruksi mengikuti latihan sukwati untuk ikut serta G30S 1965. Oleh karena itu, Gerwani tidak ada sangkut-paut dengan G30S 1965, dan Gerwani bukan anggota PKI (Hikmah, 2007). Sulami (anggota Gerwani) mengetahui kejadian pembunuhan para

jenderal di Lubang Buaya pukul 06.00 WIB pagi hari dari seorang wakil DPP datang ke kantor DPP Gerwani. Pada saat pembunuhan, sebagian besar yang ada di TKP adalah Pemuda Rakyat, Gerwani, BTI, SOBSI, istri-istri prajurit dari Divisi Cakrabirawa (Saskia, 1999:500, Hikmah, 2007:179).

Bagaimana kebenaran yang dituduhkan melalui berbagai surat kabar bahwa para anggota Pemuda Rakyat dan Gerwani terlibat penganiayaan dan pembunuhan di Lubang Buaya, dapat dilihat pada kesaksian istri seorang prajurit dari Divisi Cakrabirawa yang hadir di Lubang Buaya pada saat kejadian tersebut.

“Beberapa hari sebelum kup saya dijemput untuk melakukan pekerjaan ekstra di Halim. Ia tidak berterus terang, apa pekerjaan itu. Tapi seperti biasa, saya megikutinya saja. Begitu sampai di sana, saya diminta mendjahit pita warna-warni pada pakian-pakaian seragam, sebagai pembeda antara kawan dan lawan. Pekerjaan itu banyak sekali, sehingga kami mengerjakannya sampai larut malam. Karena itu pada 1 Oktober (1965) saya tidur nyenyak sekali, sampai kami terbangun oleh bunyi tembakan-tembakan. Di luar masih gelap, dan kami semua menjadi ketakutan. Kami lari ke lapangan, di sana kami melihat beberapa tentara menggiring jenderal-jenderal culikan mereka. Suasannya ramai sekali. Karena mereka terus-menerus meneriakkan “kabir” pada jenderal-jenderal itu. Kata yang biasa saja sebenarnya, karena kami sudah selalu mengucapkannya. Jenderal-jenderal itu dipukuli, dan akhirnya mereka ditembaki, dan dimasukkan ke dalam sumur. Begitu marah para tentara itu, sehingga peluru dihamburkan ke tubuh korban, walaupun mereka sudah mati. Kemudian dengan ketakutan, baru kami pun pergi ke sumur. Belakangan mereka menyiarkan cerita-cerita tentang tari-tarian, perbuatan seks yang tidak normal, memotong kemaluan. Semuanya itu sama sekali **bohong**. Jenderal-jenderal itu sangat ketakutan, sehingga berdiri saja mereka tidak bisa! Tapi pemudi-pemudi sukarelawan itu juga ketakutan. Mereka bersembunyi berdesak-desakan di sudut! Saya tidak tahu harus berbuat apa, sesudah tentara-tentara itu pergi. Akhirnya beberapa diantara kami pergi ke kantor Gerwani, ada lagi yang lari pulang. Dan menyembunyikan seragam mereka. Saya juga melarikan diri, tapi beberapa minggu kemudian tertangkap, dan disiksa luar

biasa. Lima kali terpaksa membawa saya ke rumah sakit. Dua tahun sesudah itu tubuh saya menjadi lumpuh.... (Saskia, 1999:504).

Berkenaan dengan tuduhan para anggota Gerwani atau Pemuda Rakyat melakukan tarian telanjang dalam pesta harum bunga di Lubang Buaya sambil melakukan perbuatan bejat terhadap enam jenderal dan seorang perwira pertama, Sugiyah (Pemuda Rakyat) yang hadir di Lubang Buaya pada saat kejadian tersebut bersaksi berikut ini.

“Ketika itu umur saya enam belas tahun, dan saya anggota Pemuda Rakyat. Saya pernah ikut latihan di Cepete, dan berkali-kali mengikuti latihan Dwikora. Sehingga waktu diminta untuk ikut ke Lubang Buaya, tentu saja saya berangkat. Saya melihat bagaimana tentara-tentara itu membunuh jenderal-jenderal, dan kemudian saya lari pulang. Pagi-pagi jam sembilan saya ditangkap, dan ditahan dua minggu. Saya dipukuli dan diinterogasi. Mereka memaksa kami membuka pakaian, dan menari-nari telanjang di depan mereka, sementara yang lain mengambil foto kami. Lalu foto-foto itu disiarkan. Tak lama kemudian saya ditangkap lagi, dan dilepas lagi. Seluruhnya saya pernah lima kali ditangkap dan dilepas, sebelum akhirnya mereka putusan untuk memenjarakan saya. Itu waktu permulaan November 1965. Dan saya dilepas bulan Desember 1982.” (Saskia:1999:506).

Para propagandis kebencian terhadap PKI menyusun cerita fiktif dengan memanfaatkan tiga pelacur (Saina, Emmi, Atikah alias Djamilah) yang kebetulan pada saat terjadi pembunuhan ke-enam jenderal dan seorang perwira pertama sedang mangkal di tempat kejadian tersebut. Pihak militer segera melakukan pengejaran terhadap ketiga pelacur itu. Emmy dan Saina tertangkap, dan disiksa hebat di dalam tahanan. Atikah belum tertangkap, namun pihak militer akhirnya mendengar informasi Atikah mengganti nama Djamilah yang sering mangkal di daerah Senin, segera dilakukan pengejaran, dan ia tertangkap. Ketiganya disiksa berat, ditelanjangi, dan disuruh menari telanjang di depan mereka, difoto, disebarkan di berbagai surat kabar, seolah-olah menari dalam pesta harum bunga di Lubang Buaya. Bahkan Emmy yang buta huruf dan belum pernah mendengar nama Gerwani, disiksa berat, setelah itu dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan yang tidak tahu isinya, tetapi ia merasa lega, karena penyiksaan dihentikan setelah surat pernyataan ditanda tangani Emmi. Surat tersebut ternyata berupa pernyataan bahwa dirinya mengaku sebagai Ketua

Gerwani cabang Jakarta dan telah ikut ambil bagian dalam penyiksaan dan pemotongan kelamin para jenderal di Lubang Buaya.” (Saskia, 1999:507-508). Berdasarkan kesaksian tersebut, ketiga pelacur tersebut mempunyai andil besar dalam menyediakan dokumen bagi penyusunan historiografi Orde Baru yang ditulis Nugroho Notosusanto dkk.

Sebenarnya ada dokumen asli dapat mengungkap ke-enam jenderal dan seorang perwira pertama yang dibunuh, yaitu hasil visum dari tim dokter Rumah Sakit Gatot Subroto diketuai Brigjen TNI dr. Roebiono Kertapati terhadap ketujuh korban. Hasil visum menunjukkan tidak ada seorangpun korban dicungkil matanya, dan semua alat kelamin para korban masih utuh (4 orang dikitan dan tiga orang tidak dikitan). Ada seorang korban bola mata copot, hal itu karena saat dimasukkan ke sumur, posisi kepala terlebih dahulu, sehingga membentur dinding sumur. Selain itu hasil visum menunjukkan ketujuh korban tewas karena luka di perut yang kemungkinan disebabkan oleh bayonet. Luka-luka selain tembakan yang direkam pada tubuh mereka menunjukkan pukulan oleh popor senapan atau sebagai akibat dilemparkan ke dalam sumur kedelamaan 36 kaki. Tak satupun dari tubuh ketujuh korban memiliki tanda-tanda penyiksaan atau mutilasi. Dokumen hasil autopsi sengaja disembunyikan Mayjen Soeharto, dan tahun 1987 seorang indolog dari Cornell University, Ben Anderson mengungkapkannya, dan heboh (Klinken, 2017:124-131).

Soeharto melakukan kontrol sejarah dengan memanipulasi naskah Supersemar. Naskah hasil manipulasi yang beredar di masyarakat seperti berikut (*DeTAK*, No.32. Tahun Ke-1, 2-8 Maret 1999:4, Tumakaka, 1998:190-191).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
SURAT PERINTAH

- I. Mengingat:
 - 1.1 Tingkatan Revolusi sekarang ini, serta keadaan politik baik Nasional maupun Internasional.
 - 1.2 Perintah Harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Presiden Panglima Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966.

II. Menimbang:

2.1 Perlu adanya ketenangan dan kestabilan Pemerintahan dan jalannya Revolusi.

2.2 Perlu adanya jaminan keutuhan Pemimpin Besar Revolusi ABRI dan Rakjat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta segala adjaran-adjaran-adjarannya

III. Memutuskan/Memerintahkan:

Kepada: LETNAN DJENDRAL SOEHARTO MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT

Untuk: Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi:

1. “Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya Pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi.
2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima Angkatan lain dengan sebaik-baiknya.
3. Supaja melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan-paut dalam tugas dan tanggungjawabnya seperti tersebut di atas.”

IV. Selesai.

Djakarta, 11 Maret 1966

PRESIDEN/PANGLIMA



TERTINGGI/PEMIMPIN BESARREVOLUSI/MANDATARIS MPRS
SOEKARNO

Menurut kesaksian Waperdam I dan Menteri Luar Negeri (1957-1966), Dr. Subandrio yang saat itu dipercaya Bung Karno untuk mengoreksi naskah Supersemar mengatakan, naskah asli Supersemar setelah diketik dan ditanda tangani Bung Karno

berjumlah dua lembar, sedangkan yang beredar di masyarakat berjumlah satu lembar. Selain seperti isi naskah Supersemar yang beredar di masyarakat berisi tiga poin (Perintah pengamanan, koordinasi dengan panglima angkatan lain, dan melapor terkait dengan tugas dan tanggungjawab), masih ada satu poin penting yakni setelah Soeharto selesai melaksanakan tugas, kekuasaan dikembalikan kepada Presiden Soekarno. Poin penting ini sengaja dihilangkan dalam naskah Supersemar yang beredar di masyarakat (*DeTAK*, No.32 Tahun Ke-1, 2-8 Maret 1999:4-5). Disinilah manipulasi sejarah dilakukan oleh pihak yang sengaja menghilangkan poin penting demi memenuhi ambisi politiknya yaitu merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno. Bahkan naskah aslinya oleh rezim Orde Baru dinyatakan hilang.

Soeharto dalam melaksanakan tugas, tidak mengindahkan perintah Supersemar bahkan melampaui tugasnya. Ia tidak koordinasi dengan panglima angkatan lain, dan tidak melapor segala sesuatu terkait tugas dan tanggungjawabnya, serta setelah selesai melaksanakan tugas, Soeharto tidak mengembalikan tugasnya kepada Soekarno. Setelah menerima Supersemar, keesokan hari (12 Maret 1966), Soeharto melangkai wewenang Presiden Soekarno dengan membubarkan PKI. Berkenaan dengan itu Soekarno memerintahkan Menteri Negara Laksda Udara, Sri Muljono Herlambang (14 Maret 1966) untuk menemui Soeharto menanyakan tidak ada koordinasi dengan Menpang AU perihal pembubaran PKI. Soeharto menjawab, pembubaran PKI atas tanggungjawabnya. Soekarno juga mengutus Waperdam Leimena untuk menyampaikan surat yang berisi mengingatkan Soeharto bahwa Supersemar itu sifatnya teknis/administratif keamanan, dan bukan politik. Surat itu juga berisi memerintahkan Soeharto supaya menghadap Presiden Soekarno untuk memberikan laporan. Soeharto tidak pernah menghadap Soekarno. Bahkan Soeharto mengubah Supersemar yang bersifat eksekutif order menjadi legislatif order (Tap MPRS No. IX/1966) yang memutuskan mengganti Soekarno, sebab pertanggungjawabannya ditolak MPRS. Akhirnya tanggal 11 Maret 1967 MPRS mengesahkan Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 mengenai pencabutan kekuasaan dari tangan Soekarno, dan ia diganti Pejabat Presiden Jenderal Soeharto (IG. Krisnadi, 2001:44-74). Itulah pentahapan kudeta merangkak Soeharto atas kekuasaan Presiden Soekarno (Asvi, 2007:61-64).

Pengendalian sejarah masa Orde Baru selain untuk menghancurkan PKI, memanipulasi naskah Supersemar, juga dilakukan untuk mengurangi pengaruh

Soekarno di hati masyarakat dengan mereduksi peran Soekarno dan yang kedua membesar-besarkan jasa Jenderal Soeharto. Contoh untuk pertama, upaya menghilangkan gambar Soekarno dalam sebuah foto pengibaran bendera pada saat proklamasi kemerdekaan. Namun tidak berhasil, karena mendapat protes dari sejarawan, Abdurrahman Surjomihardo. Upaya lain berupa tindakan politik untuk melarang ajaran Soekarno, termasuk dalam hal ini pelarangan pendirian Universitas Bung Karno oleh seorang putrinya bernama Rachmawati Soekanoputri. Tindakan deSoekarnoisasi dilakukan dengan sengaja menghapus peran Soekarno sebagai penggali Pancasila dengan menghilangkan peringatan 1 Juni 1945 sebagai hari kelahiran Pancasila diganti 1 Oktober sebagai hari kesaktian Pancasila dimana Soeharto punya peran besar menumpas pemberontakan “G30S/PKI.”

Tindakan untuk membesar-besarkan peran Soeharto dilakukan melalui buku sejarah dan media lain seperti film. Di dalam buku pelajaran sejarah di sekolah materi pelajaran Serangan Umum 1 Maret 1949 dikesankan konseptor serangan adalah Soeharto, namun secara faktual, konseptor Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah Sri Sultan Hamengku Buwana IX. Membesar-besarkan peran Soeharto tampak pula dalam film *Janur Kuning* karya sutradara Alam Surawijaya dibuat tahun 1979 (era pemerintahan Soeharto). Film ini sengaja dibuat rezim Orde Baru untuk menggantikan film “*6 Jam di Yogya*” karya sutradara Usmar Ismail (1951) yang kurang menonjolkan peran Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Film *Janur Kuning* menunjukkan pemitosan Soeharto sebagai pahlawan paling hebat dan berjasa dalam menyelamatkan negeri ini dari agresi Belanda.. *Film Janur Kuning* yang biayanya mencapai Rp. 385 juta hampir dua kali lipat biaya rata-rata pembuatan film Indonesia pada saat itu, menggambarkan Soeharto sebagai seorang komandan berwibawa, tenang, dan murah senyum. Daya fisiknya luar biasa, hal ini tampak setelah pertempuran panjang, anak buahnya tampak lelah, Soeharto tetap berjalan dengan energik. Seorang anggota pasukannya (dalam film itu) berkata “*Berjalan tujuh hari tujuh malam, Pak Harto tak pernah istirahat.*” Ia juga menjadi teladan bagi para anak buahnya. Hal ini tampak ketika ia ditawari makanan oleh penduduk yang dilewatinya, Soeharto memastikan terlebih dahulu apakah semua anak buahnya sudah memperoleh makanan tersebut. Di dalam film itu fokus kamera dan percakapan didominasi oleh Soeharto, sedangkan Jenderal Sudirman dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX hanya disorot sekilas (*Kompas* 1 Januari 2000). Berkenaan

dengan itu, mantan Komandan Brigif 1 Kodam V/Jaya, Kol. Abdul. Latief menyatakan bahwa di dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 ia bersama pasukannya terdiri tentara dan para pemuda gerilyawan di sekitar Yogyakarta mengalami kerugian berat. Ketika mengundurkan diri ke pangkalan di Kuncen, Abdul Latief hanya bisa mengumpulkan kembali sisa-sisa anak buahnya tidak lebih dari 10 orang. Korban-korban di pihaknya 12 orang tentara terluka dan 2 orang gugur, serta 50 orang pemuda gerilyawan gugur. Ketika mereka yang mandi darah itu tiba di Kuncen, mereka mendapati Soeharto lagi duduk santai sambil menyantap soto babat (Abdul Latief, 200:95-96).

3. Krisis Pembelajaran Sejarah

Waktu yang dinantikan pun tiba, rezim Orde Baru yang kokoh tumbang pada 21 Mei 1998, sejak itu Indonesia memasuki era Reformasi. Di era ini bergulir arus deras demokratisasi di segala sektor kehidupan. Penulisan sejarah dahulu dimonopoli dan dimanipulasi penguasa (militer), sehingga memunculkan historiografi yang hegemonik dan hanya ada kebenaran tunggal dalam sejarah (versi penguasa), kini muncul gugatan produk sejarah resmi Orde Baru di berbagai media massa. Bukan hanya dari kalangan kiri bersuara lantang seperti M.R. Siregar dalam buku *Naiknya Para Jenderal* (2000), melainkan para purnawirawan TNI-AD atau TNI-AU menggugat historiografi Orde Baru. Hal ini tampak dalam buku ditulis mantan Kodam V Jaya Djakarta Raya, Abdul Latief berjudul *Pledoi Kol. A. Latief: Soeharto Terlibat G.30.S* (2000) atau dalam buku Aristides Katoppo, *Menyingkap Kabut Halim 1965* (1999). Dari kalangan cendekiawan berupaya “meluruskan sejarah” atau mencoba mengungkap borok-borok rezim Orde Baru seperti ditulis Saskia Eleonora Wieringa dalam disertasi *The Politization of Gender Relation in Indonesia Womens Movement and Gerwani Until The New Order State* (1999) atau dalam disertasi Hermawan Sulistyono yang kemudian diterbitkan dalam buku *Palu Arit Di Ladang Tebu* (2000), maupun dalam tesis IG. Krisnadi *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)* (LP3ES, 2001) dan masih banyak lainnya.

Di era Reformasi bergulir demokratisasi di segala sektor kehidupan. Sejarah di masa lalu dimonopoli penguasa Orde Baru, namun kini di era Reformasi sejarah menjadi ajang pertarungan antara penguasa dengan masyarakat. Sejarah sebagai gambaran masa lalu dianggap penting dan signifikan, adalah milik masyarakat, bukan milik apa lagi menjadi monopoli penguasa sehingga bergulir demokratisasi sejarah ditandai bermunculan gugatan sejarah terhadap gambaran di masa lalu. Misal

bermunculan buku-buku yang mempertanyakan dalang atau pelaku utama yang bertanggungjawab terhadap Tragedi 30 September 1965. Dari buku-buku yang ada sampai saat ini (2010), muncul berbagai versi tentang pelaku utama yang bertanggungjawab terhadap tragedi tersebut sebagai berikut: (1) Pelaku utama Tragedi 30 September 1965 adalah PKI dan Biro Khusus dengan memeralat unsur ABRI. Buku-buku mendukung versi ini adalah buku sejarah resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru seperti: *Sejarah Nasional Indonesia* Jilid VI yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto dkk., buku paket pelajaran sejarah untuk tingkat SMP, SMA atau yang sederajat, *Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia; Latar Belakang Aksi dan Penumpasannya* (1994) yang dikeluarkan Sekretariat Negara RI, atau buku-buku ditulis kalangan militer seperti Mayjen (Purn.) Samsudin berjudul *Mengapa G30S/PKI Gagal: Suatu Analisis?* (2005), (2) Menurut versi Cornell Paper, Tragedi 30 September 1965 merupakan puncak konflik intern di tubuh TNI-AD. Buku-buku yang mendukung versi ini seperti: *A Preliminary Analysis of The October 1, 1965; Coup in Indonesia* (1966) ditulis dua ilmuwan dari Cornell University, Amerika Serikat, Benedict R. Anderson dan Ruth Mc. Vey. Selain itu ada buku lain mendukung teori ini berjudul *The Army and Politics in Indonesia* (1966) ditulis Harold Crouch; (3) Pelaku utama Tragedi 30 September 1965 adalah CIA/Pemerintah Amerika Serikat. Buku yang mendukung versi ini seperti *The United States and Overthrow of Sukarno* (1985) yang ditulis oleh Peter Dale Scott; (4) Yang menjadi dalang Tragedi 30 September adalah Soekarno. Versi ini didukung Antonie Dake dalam buku *In The Spirit of The Red Banteng*; (5) Gerakan 30 September 1965 adalah konspirasi di mana unsur-unsur nekolim ingin menggagalkan jalannya revolusi Indonesia. Hal ini terjadi karena ditunjang oleh pimpinan PKI yang *keblinger* dan oknum-oknum TNI-AD yang tidak benar. Hal ini terungkap dalam *Pelengkap Nawaksara Soekarno*. Versi ini didukung oleh JK. Tumakaka dalam buku berjudul *Peralihan Kekuasaan Soekarno, Soeharto, Habibie* (1998). (6) Yang menjadi dalang Gerakan 30 September 1965 adalah oknum-oknum PKI yang tergabung di dalam Biro Khusus seperti: Syam Kamaruzaman, Aidit. Versi ini didukung oleh sebuah tim dari Institut Studi Arus Informasi yang menulis buku *Bayang-Bayang PKI* (1995) (ISAI, 1995).

Pada masa Reformasi, semakin deras arus informasi melalui berbagai media massa menampilkan banyak kebenaran sejarah, sehingga membingungkan guru dalam

mengajarkan sejarah kepada anak-anak didik di kelas. Seorang guru sejarah yang berpegang buku paket dari pemerintah merasa sulit mengajar. Sementara itu para siswa sering berpijak pada informasi ditawarkan melalui media massa. Tidak mengherankan jika jawaban disampaikan guru bertentangan dengan informasi diperoleh para siswa, sehingga tidak jarang diantara para guru dituduh membohongi murid. Berakibat, kredibilitas guru sebagai pendidik di mata siswa langsung merosot. Dalam keadaan demikian, terjadi krisis pembelajaran, sejarah telah membingungkan guru, dan guru pun telah membingungkan murid. Hal ini seperti dirasakan Kepala Sekolah SMPN 15 Pontianak, Dewi Hariyani (45 tahun) dituduh telah membohongi muridnya seperti dalam kutipan di bawah ini: *“Terus terang, saya sebetulnya dituduh siswa membohongi mereka. Misal ketika saya mengajarkan tentang materi G.30.S/PKI atau Supersemar. Rasanya sakit sekali, tetapi inilah konsekuensi profesi. Lagi pula saya hanya berpatokan pada materi yang ditetapkan pemerintah (Kompas, Sabtu 29 April 2000).* Pendapat senada dilontarkan Endang Sukeni (30 tahun), guru SMU swasta di Cipete, Jakarta Selatan yang mengatakan dirinya diduga menipu murid-muridnya ketika mengajarkan materi sejarah seputar runtuhnya Orde Lama dan kelahiran Orde Baru seperti dalam kutipan berikut: *“Jadi selama ini Ibu menipu kami?”* Tanya seorang siswa kepada guru sejarah. *“Tidak, Ibu sama sekali tidak bermaksud menipu, Ibu hanya menerangkan apa yang ada dalam buku pelajaran.”* Jawab seorang guru. *“Tapi nyatanya di koran-koran ditulis lain,”* timpal murid lain. *“Baiklah. Tapi kalian mesti maklum, Ibu ini seorang guru, bukan sejarawan. Tugas utama Ibu, mendidik kalian untuk mencintai bangsa ini,”* jawab sang guru dengan nada lembut dan bijak. Hal serupa dialami Woro Kusri (25 tahun), guru sejarah SMA Cenderawasih I, Jakarta Selatan yang seringkali merasa susah untuk menerangkan kepada murid mengenai materi pelajaran sejarah seputar berakhirnya pemerintahan Soekarno dan kelahiran Orde Baru. Apa lagi di era Reformasi, orang ramai bicara dalang G30S 1965 atau manipulasi Soeharto terhadap naskah Supersemar untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno (DeTAK No.32 Tahun Ke-1, 2-8 Maret 1999:20).

Keadaan krisis pembelajaran sejarah juga dialami para guru sejarah di SMP se-Kabupaten Jember tergabung dalam MGMP-Sejarah (Musyawarah Guru Mata Pelajaran-Sejarah). Bahkan diantara mereka menemui saya untuk menyampaikan keluhan berkenaan kesulitan mengajar sejarah Indonesia masa Orde Baru di era

Reformasi. Pada pertemuan itu, mereka menanyakan apa ada buku ajar sejarah yang dapat dijadikan buku pegangan untuk mengajar sejarah Indonesia masa Orde Baru. IG. Krisnadi, 17 Maret 2006). Keluhan serupa disampaikan para guru bidang studi sejarah di tingkat sekolah menengah maupun atas di lingkungan kerja Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah dalam seminar bertema Sosialisasi Kurikulum Sejarah Terkait Peristiwa G.30.S/PKI 1965 yang diselenggarakan oleh MSI Cabang Jawa Tengah yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah dan Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro di Aula Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah Jalan. Pemuda No. 134 Semarang pada 7 Desember 2006. Di dalam seminar tersebut, para guru mengeluh berkenaan kesulitan mengajar sejarah Indonesia masa Orde Baru di era Reformasi dan meminta supaya segera disusun buku ajar sejarah Indonesia masa Orde Baru yang dapat dijadikan sebagai buku pegangan mengajar (IG. Krisnadi, 17 Desember 2006).

Untuk menghindari polemik sejarah yang terjadi antara guru dengan siswa tentang sejarah masa Orde Baru yang diperdebatkan, Menteri Pendidikan Yuwono Sudarsono (1998-1999) memerintahkan jajarannya untuk memperbaiki isi buku resmi pelajaran sekolah sambil meminta menanggihkan sejumlah materi pelajaran sejarah (Orde Baru) yang sedang diperdebatkan publik. Beberapa materi/pokok bahasan yang ditunda pembelajarannya adalah (1) Serangan Umum 1 Maret 1949; (2) Peristiwa G.30.S/PKI Tahun 1965; (3) Lahirnya Orde Baru; (4) Proses Timor Timur menjadi propinsi ke-27 (Suranto, 22 Maret 2000:7). Namun hasil perbaikan isi buku resmi pelajaran sejarah belum memuaskan. Materi Serangan Umum 1949, peranan Soeharto diturunkan, dan peranan banyak diberikan kepada Sultan Hamengku Buwono IX sebagai pengambil prakarsa. Materi kudeta 1965 dan peranan militer tidak diubah, para korban 1965-1966 masih dibungkam (Schulte Nordholt dkk.,2008:18). Sekalipun hasil perbaikan isi buku materi pelajaran sejarah belum memuaskan, namun telah mengubah penyajian periode Orde Baru. Di dalam kurikulum 1994 dijelaskan kelahiran, hasil-hasil dan nilai-nilai Orde Baru termasuk “integrasi” Timor Timur, maka dalam edisi revisi 2001, sejarah Orde Baru dipadatkan menjadi tiga bagian (1) daftar menteri Orde Lama digantikan kabinet baru 1966; (2) Supersemar plus catatan-catatan interpretasi mengenai keaslian dokumen; (3) pemerintahan Soeharto kandas oleh KKN diikuti krisis ekonomi 1997.

Periode 1966 -1997 seolah-olah periode kosong tanpa kejadian, ini menyiratkan menguap Orde Baru dalam sejarah. Namun ditampilkan pemerintahan Soeharto kandas oleh KKN diikuti krisis ekonomi 1997, dilanjutkan optimis era Reformasi diakhiri pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri Oktober 1999 (Schult Nordolt, dkk., 2008),

Pemerintah meluncurkan kembali buku pelajaran sejarah (2004) dengan menyebutkan kudeta 1965 dengan istilah G30S, bukan G30S/PKI, sehingga dikecam oleh masyarakat, karena dianggap menghilangkan peran PKI dalam kudeta 1965. Akhirnya buku itu ditarik, dan diluncurkan buku pelajaran IPS (2007) mencakup bidang studi Sejarah, Geografi, Ekonomi. Di dalam buku itu khususnya bidang studi sejarah, istilah G30S tidak muncul, dan akronim G30S/PKI kembali dimunculkan (Suhartono dkk.,2007). Setahun kemudian pemerintah meluncurkan kembali buku pelajaran IPS (2008), selain menampilkan akronim G30S/PKI, menampilkan peristiwa-peristiwa penting masa Orde Baru termasuk sejarah perekonomian masa Orde Baru sampai muncul krisis ekonomi dan gerakan Reformasi serta berakhirnya pemerintahan Orde Baru (Sutarto dkk., 2008).

Krisis pembelajaran sejarah di sekolah hingga kini masih berlangsung, disebabkan substansi buku pelajaran sejarah salah, strategi paedagogis penulisannya pun *semrawut*, ganti pimpinan ganti kebijakan, ganti buku pelajaran berorientasi “proyek.” Banyak diantara pengajar sejarah tidak memiliki latar belakang pendidikan sejarah, semakin memperparah pembelajaran sejarah. Akhirnya para murid pun lebih senang memilih “diam” dan apatis ketika mengikuti pelajaran sejarah di kelas (Dwi Sunaryati, 18 Nopember 2017). Itulah benang kusut pembelajaran sejarah di sekolah yang masih terus berlangsung entah kapan berakhirnya. Sementara itu pihak-pihak terkait dalam pembelajaran sejarah seperti Menteri Pendidikan beserta jajarannya masih sibuk dengan urusan *gonta-ganti* pimpinan, *gonta-ganti* kebijakan, *gonta-ganti* buku pelajaran berorientasi proyek, dan belum menyentuh persoalan substansial pembelajaran sejarah. Sementara itu sebagian sejarawan maupun para pakar pendidikan sejarah yang dekat dengan pengambil kebijakan lebih senang memilih menunggu kucuran “proyek,” daripada merenung, berdiskusi bersama untuk memecahkan persoalan substansial pembelajaran sejarah.

4. Memformat Ulang Historiografi Masa Orde Baru

Taufik Abdullah membagi penulisan sejarah kedalam tiga macam kebutuhan, yakni untuk keperluan akademik, publik, untuk pelajaran sekolah. Jika sejarah ditulis untuk kepentingan akademik, maka harus didekati dari sisi keilmuan, sehingga sejarah ditulis berdasarkan kebenaran peristiwanya saja. Jenis ini dikerjakan orang menulis skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah. Jika sejarah ditulis untuk kepentingan publik, penulisannya bersifat populer, karena sejarah ditulis untuk mengatakan sesuatu di balik peristiwa. Namun jika sejarah ditulis untuk keperluan pelajaran anak-anak sekolah, maka sejarah ditulis sebagai kebutuhan sosialisasi membangun karakter para muridnya agar memiliki rasa mencintai dan bangga terhadap bangsa dan tanah airnya. Oleh karena itu sejarah seharusnya diperlakukan sebagai ilmu, artinya materi sejarah yang digunakan memiliki kebenaran ilmiah, dan strategi paedagogis penulisannya harus sesuai dengan sasaran tujuan pembelajaran sejarah (DeTAK, No.32 Tahun Ke-1, 2-8 Maret 1999:20).

Lantas muncul pertanyaan substansial, bisakah seorang guru mengajarkan kearifan berbangsa dari sejarah yang salah? Bisakah seorang guru mengajarkan kepada para murid menggunakan materi sejarah masa Orde Baru yang kredibilitasnya rusak? Tentu tidak mungkin,? jika tidak mungkin, persoalan bergeser ke bagaimana menyediakan materi pelajaran sejarah masa Orde Baru yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Untuk itu historiografi Orde Baru harus diformat ulang, dan tugas ini menjadi tanggung jawab bersama para sejarawan.

Langkah pertama diayunkan untuk memformat ulang historiografi Orde Baru dengan melakukan dekolonisasi atau demiliterisasi historiografi masa Orde Baru. Ironis, itu kata paling tepat untuk mengatakan bahwa sejarah” tanpa kekerasan” dari sebuah orde didominasi militer. Itu ditunjukkan historiografi Orde Baru (Sejarah Nasional Jiid VI) di bawah pimpinan sejarawan militer Nugroho Notosusanto yang berhasil mewarisi “ilmu” para sejarawan kolonial dalam historiografi kolonial Belanda yang berhasil menghapus tindak kekerasan dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Hal itu sangat paradoks dengan kenyataan sesungguhnya. Sejak kelahirannya, jabang bayi bernama Orde Baru telah berlumuran darah, darah PKI dalam serangkaian pembunuhan massal di daerah-daerah Jawa, Sumatra, Bali dan dimungkinkan di tempat-tempat lain. Belum lagi serangkaian kekerasan lain dipertontonkan rezim Orde Baru selama berkuasa, sebut saja Gerakan Aceh Merdeka (1976-2001), Peristiwa Malari (1974), Petisi 50 (1982),

Peristiwa Tanjung Priok (1984) Kasus Marsinah (1993), Penculikan Aktivis Demokrasi (1996), Peristiwa Lampung (1989), Penyerbuan kantor DPP PDI Perjuangan (1996), Pelanggaran HAM di Timor-Timur (1976-1999), Peristiwa Kedungombo (1989), Kasus Nipah-Madura (1993), Pembunuhan Dukun Santet di Banyuwangi (1998-1999). Untuk itu, format ulang dilakukan dengan menampilkan para korban tindak kejahatan kemanusiaan dilakukan rezim Orde Baru dalam buku sejarah nasional.

Kehadiran para korban kekerasan rezim Orde Baru di tingkat lokal bukan sekedar mengisi ruang sejarah nasional yang menghubungkan peristiwa sejarah di tingkat lokal dengan peristiwa sejarah di tingkat nasional, melainkan memberi nuansa baru dan membentuk genre historiografi Orde Baru yang lebih egalitarian, dan sekaligus mengakomodir hasrat Sartono Kartodirdjo dalam menampilkan berbagai gerakan sosial di tingkat lokal yang memiliki dimensi nasional sebagai bentuk perlawanan *wong cilik* terhadap pemerintahan Soeharto. Hal ini mengubah historiografi masa Orde Baru yang militeristik dan “bebas dari kekerasan” menjadi historiografi Orde Baru yang militeristik sarat dengan tindak kekerasan. Jika upaya format ulang berhenti sampai di sini, historiografi Orde Baru hanya menampilkan sejarah orang-orang kecil yang memberontak, maka keterlibatan orang-orang kecil dalam sejarah harus diperluas dengan menampilkan sejarah kehidupan sehari-hari orang-orang kecil dalam panggung sejarah nasional (Bambang Purwanto, Asvi, 2013:38-39), sehingga akan mengubah wajah historiografi yang “kolonialistik,” militeristik menjadi historiografi yang egalitarian.

Selain itu, format ulang historiografi Orde Baru dilakukan dengan mengisi ruang kosong yang tersedia dengan menampilkan sejarah perekonomian masa Orde Baru dimulai dengan upaya pemerintah Orde Baru melakukan stabilitas ekonomi, bisnisnya para jendral sarat dengan KKN hingga munculnya krisis ekonomi (krisis moneter) yang membawa kejatuhan rezim Orde Baru. Ruang kosong belum tersentuh historiografi Orde Baru lainnya seperti menampilkan sejarah ketahanan pangan dibangun pemerintah Soeharto melalui program Revolusi Hijau, dan memperoleh hasil positif berupa pencapaian target swasembada beras (1983) (Nawiyanto dkk.,2011:105-106). Namun pembangunan besar-besaran dilakukan pemerintah Orde Baru untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, juga membawa dampak pada perubahan lingkungan. Oleh karena itu sejarah lingkungan ditampilkan dalam mengisi ruang yang belum

tersentuh oleh historiografi masa Orde Baru garapan Nugroho Notosusanto dkk, menjadi pilihan bijak (Nawiyanto, 2016).

Bagaimana peran negara dalam memformat ulang historiografi Orde Baru? Seyogyanya negara berperan sebagai fasilitator dengan mengajak para sejarawan, para pakar pendidikan sejarah, maupun berbagai instansi terkait (ANRI, Perpustakaan Nasional dan sebagainya) maupun pihak-pihak lain untuk menyusun historiografi Orde Baru yang kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam hal ini, negara tidak boleh mengambil kesempatan “menunggang sejarah” untuk menguasai kesadaran masyarakat, dan negara tidak boleh “serakah” yang ingin menguasai dan memonopoli tentang apa yang harus dianggap benar, dan tentang apa yang dianggap baik sambil menidurkan daya kritis masyarakat (Mudji Sutrisno, 1992:14-15) seperti yang pernah dipertontonkan rezim Orde Baru selama ini.

Segera setelah diperoleh historiografi Orde Baru yang kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, segera para pakar pendidikan sejarah menyusun buku ajar sejarah Indonesia masa Orde Baru untuk pegangan guru dalam mengajar anak didiknya di sekolah tingkat dasar, menengah, dan atas didasarkan strategi paedagogis penulisannya yang tepat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran sejarah. Buku ajar yang dihasilkan diharapkan segera mengakhiri masa krisis pembelajaran sejarah masa Orde Baru . Buku ajar yang akan dihasilkan menolak kebenaran sejarah tunggal yang hegemonik seperti yang pernah terjadi selama rezim Orde Baru berkuasa, melainkan menampilkan berbagai kebenaran sejarah, menurut versi masing-masing dengan mempersilahkan guru sejarah membimbing para siswa untuk mengkritisnya (IG. Krisnadi, 17 Desember 2006).

Para guru sejarah di era Reformasi harus meninggalkan kebenaran tunggal sejarah versi Orde Baru. Buku ajar yang dihasilkan, dijadikan buku pedoman guru dalam mengajar sejarah kepada murid-murid secara demokratis, sehingga guru mampu memahami perdebatan (gugatan) sejarah yang sedang terjadi di era ini hanya bagian dari dinamika dalam wacana akademik dan intelektual (IG. Krisnadi, 2010:83-102). Apakah mungkin hal ini dapat dipahami jika guru yang mengajar sejarah berlatar belakang pendidikan ekonomi atau geografi? Malah guru berlatar belakang pendidikan sejarah menghabiskan energinya untuk mengajar bidang studi geografi atau ekonomi. Kondisi sistem pembelajaran yang *semrawut* terkait kebijakan pemerintah memasukkan

pelajaran sejarah ke dalam pelajaran IPS Terpadu sejak tahun 2007 hingga masa kini. Ini hanya semakin menambah krisis pembelajaran sejarah di sekolah. Berkenaan dengan itu, sebaiknya pihak pemerintah segera menarik ulang pelajaran IPS Terpadu (2007) yang membuat sistem pembelajaran semakin *semrawut*, dan mengembalikan bidang studi sejarah sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, dan para guru sejarah fokus mengajar mata pelajaran sejarah secara profesional dan demokratis.

Para guru sejarah setelah memahami proses demokratisasi di bidang sejarah, diharapkan mereka mampu meredam perdebatan sejarah yang terjadi dengan para peserta didiknya di dalam kelas maupun yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Para guru sejarah harus mampu memahami perdebatan sejarah yang semakin mengarah kepada kepentingan politik dan “balas dendam,” melainkan mereka harus mampu mendampingi para peserta didiknya dengan memberikan pemahaman sejarah yang memantulkan kearifan hidup berbangsa dan mencintai tanah air, serta dapat memahami “tanda-tanda lalu lintas” dalam perjalanan sejarah bangsa.

5. Kesimpulan

Historiografi Orde Baru disusun berdasarkan dokumen palsu, kesaksian palsu, sehingga kredibilitas rusak dan cacat metodologis. Dapur penyusun historiografi Orde Baru, institusi militer, Orde Baru ditampilkan sebagai stabilisator dan dinamisator dari jalannya sejarah, dan sebagai pengintegrasikan bangsa, serta sebagai penjaga negara dari rongrongan PKI. Terjadi paradoks dalam historiografi Orde Baru yang militeristik dengan menampilkan sejarah “tanpa kekerasan”, namun kenyataannya sejak kelahirannya hingga kejatuhan rezim Orde Baru dipenuhi sejarah kekerasan, namun secara sengaja menghapuskan pembunuhan massal terhadap anggota/simpatian atau berstigma PKI dan berbagai pelanggaran HAM lainnya dari ingatan masyarakat.

Arus deras informasi pada masa Reformasi mempersulit posisi guru sejarah dalam memberikan materi pelajaran sejarah dalam kegiatan belajar-mengajar. Berbagai gugatan sejarah tentang gambaran masa lalu muncul di era Reformasi, berimplikasi terhadap terjadinya polemik sejarah antara guru dengan siswanya. Untuk menghindari hal ini, pemerintah hingga kini belum mampu mengatasi persoalan krisis pembelajaran sejarah secara substansial, sehingga format ulang historiografi masa Orde Baru tidak terelakkan.

Format ulang terhadap historiografi Orde Baru dilakukan menghadirkan para korban Orde Baru dalam buku sejarah nasional. Selain itu juga ditampilkan sejarah gerakan sosial di tingkat lokal berskala nasional, sejarah kehidupan sehari-hari orang-orang kecil, sejarah perekonomian, sejarah ketahanan pangan dan sejarah lingkungan masa Orde Baru mengisi ruang kosong yang belum tersentuh historiografi masa Orde Baru. Tersusunnya historiografi masa Orde Baru yang kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, disusun buku ajar sejarah yang berwawasan demokratis, guru dapat mengajarkan pelajaran sejarah secara demokratis, dan mengakhiri krisis pembelajaran sejarah.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik. *Perdebatan Sejarah dan Tragedi 1965* (Makalah). Disajikan dalam Seminar Pra KIPNAS dengan topic Memandang Tragedi Nasional Secara Jernih, diselenggarakan MSI di Gedung Riset Nasional; PUSPITEK, Serpong Jawa Barat, 8 September 1999.
- Adam, Asvi Warman. Manipulasi Sejarah, (Artikel), dalam Tim Cidesindo, *Membuka Lipatan Sejarah: Menguak Fakta Gerakan PKI*. Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1991.
- _____. *Kontrol Sejarah Semasa Pemerintahan Soeharto*. Disajikan dalam Seminar Pra KIPNAS yang diselenggarakan MSI dengan topik *Memandang Tragedi Nasional 1965 Secara Jernih*, di Gedung Dewan Riset Nasional, PUSPITEK, Serpong, 8 September 1999.
- _____. *Seabad Kontroversi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2007.
- _____. *Pelurusan Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Ombak, 2009.
- Amurwani Dwi Lestariningsih. *GERWANI: Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan*. Jakarta: Kompas, 2011.
- Anderson, Benedict, Ruth Mc Vey. *A Preliminary Analysis of The October 1, 1965 Coup in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Southeast Asia Program, 1971.
- Crouch, Harould. *The Army and Politics in Indonesia*. Edisi revisi. Ithaca: Cornell University Press, 1988.

- Dake, A.C.A. *In the Spirit of the Red Banteng: Indonesian Communism between Moscow and Peking 1959-1965*. The Hague: Mouton, 1973.
- Diniah, Hikmah. *Gerwani Bukan PKI: Sebuah Gerakan Feminisme Terbesar di Indonesia*. Yogyakarta: CarassvatiBooks, 2007.
- Djarot, Eros, dkk. *Siapa Sebenarnya Soeharto: Fakta dan Kesaksian Para Pelaku Sejarah G-30-S/PKI*. Jakarta: Media Kita, 2006.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. Terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975.
- Irawan, Budi. Film Ideologi & Militer: Hegemoni Militer (Artikel). *Kompas* 1 Januari 2000.
- Katoppo, Aristides. *Menyingkap Kabut Halim 1965*. Jakarta: Penebar Swadaya, 1999.
- Latief, Abdul. *Pledoi Kol. A. Latief: Soeharto Terlibat G.30.S*. Jakarta: ISAI, 2000.
- Luhulima, James. *Menyingkap Dua Hari Tergelap di Tahun 1965: Melihat Peristiwa G30S dari Perpektif Lain*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Kementerian Pendidikan Pengadjaran dan Kebudayaan. *Seminar Sedjarah: Laporan Lengkap Atjara I dan II tentang Konsepsi ilsafat Sedjarah Nasional dan Periodisasi Sedjarah Indonesia*. Djogdjakarta: UGM, 14-15 Desember 1957.
- Klinken, Helene van (Ed.),. *Final Report on The International People's Tribunal on Crimes Against Humanity in Indonesia 1965*. IPT 1965. Bandung, Foundation, The Hague-Jakarta, 2017.
- Kompas*, "Ketika Sejarah Membingungkan Guru", 29 April 2000.
- Krisnadi, IG. *Tahanan Politik Pulau Buru*. Jakarta: LP3ES, 2001.
- _____. Menggugat Sejarah Orde Baru Yang Hegemonik. *Jurnal Historia* Vol. V, No.1 (Juni 2010).
- _____. *Historiografi Indonesia Tradisional*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2013.
- _____. *Kontroversi Seputar Peristiwa G.30.S 1965* (Makalah) dalam Seminar Sosialisasi Kurikulum Sejarah Terkait Peristiwa G.30.S/PKI 1965 Pada Guru-guru Sejarah Sekolah Menengah Se-Jawa Tengah yang diselenggarakan oeh Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Jawa Tengah pada Kamis 7 Desember 2006 di Aula Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah Jalan Pemuda 134, Semarang.

- _____. Mengungkap Aktor di Balik Gerakan 30 September 1965, dalam *Malam Bencana 1965: Dalam Belitan Krisis Nasional: Bagian I: Rekonstruksi dalam Perdebatan*. (Taufik Abdullah, dkk.), Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- _____. Tapal Kuda Bergolak, dalam *Malam Bencana 1965: Dalam Belitan Krisis Nasional: Bagian I: Rekonstruksi dalam Perdebatan*. (Taufik Abdullah, dkk.), Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Mabes ABRI. *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia Jilid IV A, Pemberontakan G30S/PKI dan Penumpasannya*. Jakarta, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI.
- Mariana, Anna. *Perbudakan Seksual: Perbandingan Antara Masa Fasisme Jepang dan Neofasisme Orde Baru*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2015
- Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notokusanto, 1984 *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Nadia, Ita F. *Suara Perempuan Korban Tragedi '65*. Yogyakarta: Galang Press, 2009.
- Nugroho Notokusanto, dkk. *Sejarah Nasional Indonesia: Untuk SMP Jilid 1, 2, 3*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975.
- Nugroho Notokusanto, dkk. *Sejarah Nasional Indonesia: Untuk SMA Jilid 1, 2, 3*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.
- Nanang Indra Kurniawan (Penyunting). *Genjer-Genjer; Kuasa dan Kontestasi Makna*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2007.
- Nawiyanto, dkk. *Pangan, Makan, dan Ketahanan Pangan: Konsepsi Etnis Jawa dan Madura*. Yogyakarta: Galang Press, 2011.
- _____. *Historiografi Lingkungan: Konteks, Praktek, dan Prospeknya di Indonesia*. Orasi Ilmiah Pengukuhan Profesor. Kemenristek Dikti, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember, 12 Oktober 2016.
- Patria, Nezar, dan Andi Arief. *Antonio Gramsci: Negara & Hegemoni, Cetakan II*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Panitia Seminar Sejarah Tahun 1957. *Laporan Seminar Sejarah Pada 14-18 Desember 1957 di Yogyakarta*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017.
- Pengaduan masalah krisis pembelajaran sejarah Dwi Sunaryati dkk selaku anggota MGMP-Sejarah se-Kabupaten Jember di Jurusan Sejarah, 17 Maret 2006.

- Purwanto, Bambang dan Asvi Warman Adam. *Menggugat Historiografi Indonesia*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Roosa, John. *Dalih pembunuhan massal: GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SUHARTO*. Jakarta: Hasta Mitra, 2008.
- Samsudin. *Mengapa G30S/PKI Gagal: Suatu Analisis*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Santosa, Aboeprijadi, dkk.,(ed.). *Dari Beranda Tribunal: Bunga Rampai Kisah Relawan*. Bandung, 2017.
- Schulte Nordholt, Henk, Bambang Purwanto, Ratna Saptari (Ed.). *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-KITLV-Jakarta, 2008.
- Sekretariat Negara RI. *Gerakan 30 September. Pemberontakan Partai Komunis di Indonesia. Latar Belakang Aksi dan Penumpasannya*. Jakarta: Teplok Press, 1994.
- Simon, Roger. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Diterjemahkan Kamdani dan Imam Baehaqi. Yogyakarta: INSIST Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar. Cetakan Ke IV, 2004.
- Siregar, M.R., *Naiknya Para Jenderal*. Medan: Sumatera Human Rights Watch Network, 2000.
- Soerojo, Soegiarso. *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai*. Jakarta: Penerbit Antar Kota, 1989.
- Sri Margono, dkk. *Sejarah Pangan di Indonesia: Strategi dan Politik Pangan dari Masa Kolonial Sampai Reformasi*. Jakarta: Direktorat Geografi Sejarah, Dirjen Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2010.
- Stanley (Penyunting). *Bayang-Bayang PKI*, Jakarta: ISAI, 1995.
- _____. *Penggambaran Gerwani Sebagai Kumpulan Pembunuh dan Setan, Fitnah dan Fakta Penghancuran Organisasi Perempuan Terkemuka*. (Makalah) disajikan dalam Seminar Pra KIPNAS yang diselenggarakan MSI dengan topik “Memandang Tragedi Nasional 1965 secara Jernih di Gedung Dewan Riset Nasional, PUSPITEK, Serpong 8 September 1999.
- Suhartono, dkk. *IPS Untuk SMP dan MTS Kelas IX*. Jakarta: Widya Utama, 2007.

- Sukarno. *Di Bawah Bendera Revolusi Djilid Pertama*. Djakarta: 1964: Di Bawah Bendera Revolusi, 1964.
- Sulistyo, Hermawan. *Palu Arit Di Ladang Tebu*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Suranto, *Pembelajaran Sejarah di Sekolah Pada Era Reformasi*. (Makalah), disajikan dalam pemantapan kerja Guru Sejarah se-Eks-Karesidenan Besuki di Aula Pemda Tingkat II Jember, 22 Maret 2000.
- Sutarto, dkk. *IPS Untuk SMP/MTS Kelas IX*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Sutrisno, Mudji. Hegemoni; dalam *MATRA*, Edisi Khusus III, Agustus 1992. Tabloid *Detak* No. 32, Tahun Ke-1, 2-8 Maret 1999.
- Tumakaka, JK. *Peralihan Kekuasaan Soekarno, Soeharto, Habibie*. Jakarta: Hasta Mitra, 1988.
- Wawancara dengan Dwi Sunaryati, Guru Sejarah SMPK Maria Fatima Jember 18 Nopember 2017.
- Wieringa, Saskia Eleonora. *The Perfumed Nightmare*. Diterjemahkan Hersri Setiawan berjudul *Kuntilanak Wangi: Organisasi-Organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950*. Jakarta: Kalyanitra, 1998.
- _____. *The Politization of Gender Relation in Indonesia Womens Movement and Gerwani Until The New Order State*, (Desertasi). Terjemahan Hersri Setiawan, *Penghancuran Organisasi Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Garba Budaya dan Kalyanitra, 1999.
- Wood, Michael. *Sejarah Resmi Indonesia Modern Versi Orde Baru dan Para Penantangannya*. Yogyakarta: Ombak, 2013.